

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas izin Nya maka Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan dengan baik, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban tugas, wewenang yang diemban selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja ini memuat kondisi serta realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Selama Tahun Anggaran 2023 dan menggambarkan tentang pencapaian kinerja sasaran OPD pada tahun tersebut, serta menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan program organisasi OPD.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pemerintah yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Bengkulu Selatan

Kami menyadari sepenuhnya didalam pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, hal ini akan tetap diupayakan perbaikan demi kesempurnaan dalam usaha peningkatan kinerja yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Manna, Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan,



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai untuk mewujudkan visi dan misi serta strategi yang jelas dan terukur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis yang ada, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini juga digunakan sebagai umpan balik dan tindak lanjut pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Dalam Laporan Kinerja ini tertuang tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 dimana pencapaian sasaran tersebut diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bengkulu Selatan.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 telah terlaksana dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditinjau kembali sesuai dengan kondisi serta merespon tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang dijabarkan ke dalam 6 Program dan 15 Kegiatan dan telah menggunakan anggaran belanja

langsung sebesar Rp.31.609.779.290,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 39.811.810.880,-. Target program dan kegiatan mengacu pada 10 indikator sasaran. Berdasarkan data realisasi yang ada secara keseluruhan target sasaran dapat tercapai sebagaimana secara rinci dapat dilihat pada Bab III Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 ini.

Meskipun telah banyak kinerja yang dihasilkan selama tahun 2023, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang masih perlu segera untuk diselesaikan, seperti peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai pendidikan dasar sembilan tahun, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan penyebaran guru yang belum merata. Namun demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan akan selalu berusaha mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian atau pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun serta diharapkan pada akhirnya nanti mampu meraih visi dan misi Kabupaten Bengkulu Selatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR GRAFIK	10
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	13
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	13
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	16
A. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	16
B. Isu Strategis Perangkat Daerah	21
C. Keadaan Pegawai	23
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	25
E. Keuangan	27
1.5 Sistematika Penulisan dan Inovasi	28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	30
A. Visi, Misi Kepala Daerah	32
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	33
C. Strategi dan Arah Kebijakan	38
2.2 Perjanjian Kinerja	41
2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah	43
A. Target Belanja	45
B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	46

3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	48
3.3	Realisasi Anggaran	63
3.4	Inovasi Perangkat Daerah	70
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Rekomendasi	73

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL
1.1	TABEL JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
1.2	TABEL JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
1.3	TABEL JUMLAH PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN PENJENJANGAN
2.1	TABEL TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
2.2	TABEL STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
2.3	TABEL PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
2.4	TABEL PRIORITAS PEMBANGUNAN
2.5	TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2.6	TABEL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
2.7	TABEL ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM
2.8	TABEL ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS
3.1	TABEL SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA
3.2	TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA AKSES LAYANAN PENDIDIKAN
3.3	TABEL PENCAPAIAN IKU INDIKATOR KINERJA SASARAN MENINGKATNYA AKSES LAYANAN PENDIDIKAN
3.4	TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN
3.5	TABEL PENCAPAIAN IKU INDIKATOR KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN
3.6	TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3.7	TABEL PENCAPAIAN IKU INDIKATOR KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.8	TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH
3.9	TABEL PENCAPAIAN IKU INDOKATOR KINERJA SASARAN MENINGKATNYA PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH
3.10	TABEL CAPAIAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR
1	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas SMPN 16 Bengkulu Selatan
2	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2022/2023
3	Kegiatan Pendampingan Kelompok (Lokakarya) Program Guru Penggerak (PGP) Angkatan VI
4	Kegiatan Monitoring Cagar Budaya Tahun 2023

DAFTAR GRAFIK

NO	JUDUL GRAFIK
1	Grafik Pencapaian IKU Sasaran 1
2	Grafik Pencapaian IKU Sasaran 2
3	Grafik Pencapaian IKU Sasaran 3
4	Grafik Pencapaian IKU Sasaran 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan selanjutnya didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pendanaan yang tidak boros, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data yang akurat dan dapat disajikan secara memadai dalam suatu laporan. Dengan demikian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, para pejabat dan pegawai dituntut untuk bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan dan program secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut melakukan pembenahan kinerja dan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub

sistem dari pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil kegiatan dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan pencapaian indikator kinerja utama dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian program-program strategis selama Tahun 2023.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian program-program strategis serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan.
3. Keberhasilan, kegagalan dan kendala-kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lainnya tahun 2023.
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi serta sekaligus merupakan penilaian terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan bulan akhir Desember 2023.
5. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan program-program strategis di tahun mendatang.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

- tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam salah satu program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu melakukan revitalisasi fungsi lembaga perencanaan daerah termasuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pengelola keuangan daerah.

Pelayanan di bidang Pendidikan ditunjukkan melalui penyediaan sarana dan prasarana secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pemberian Perizinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pembinaan teknis di bidang Kebudayaan.
4. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Dinas.
5. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

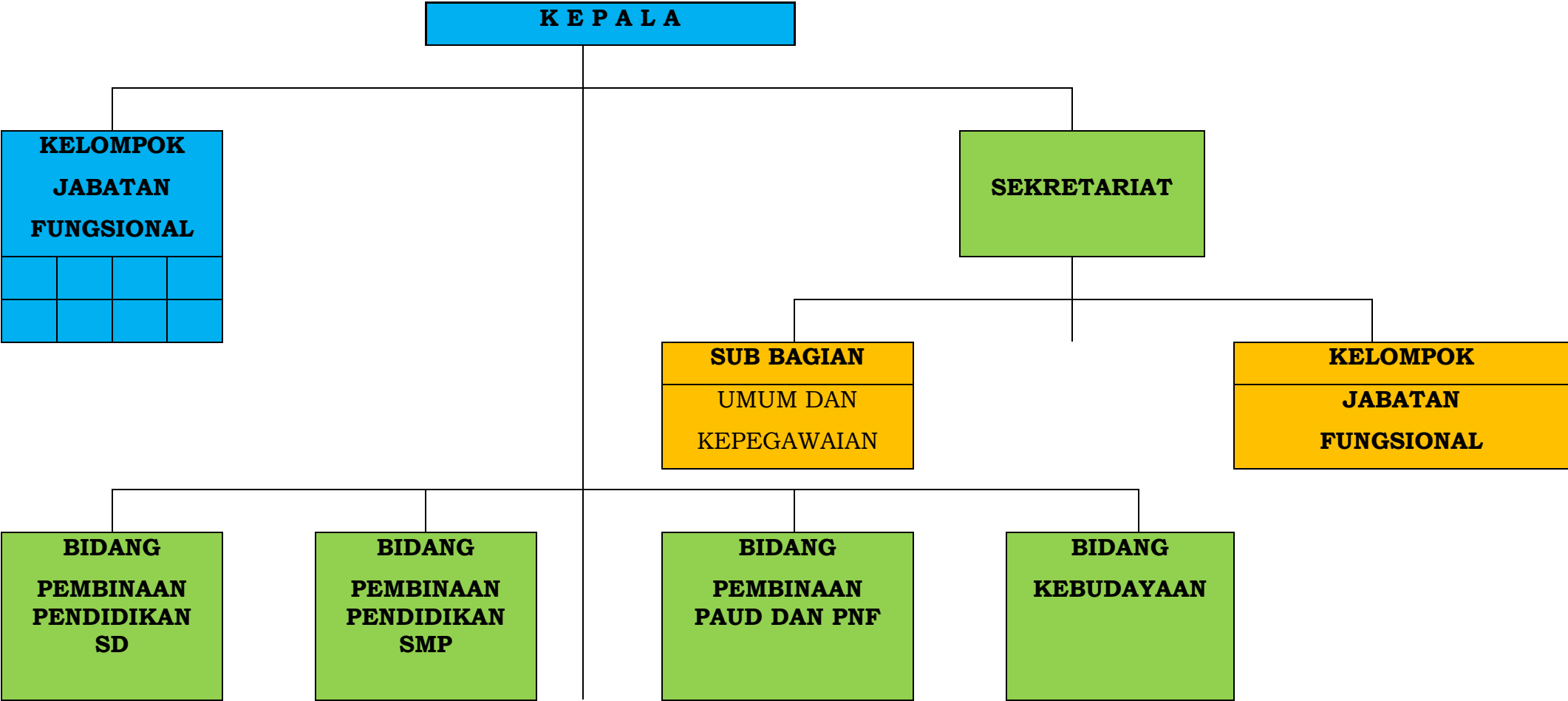
6. Pelaksanaan Ketatausahaan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

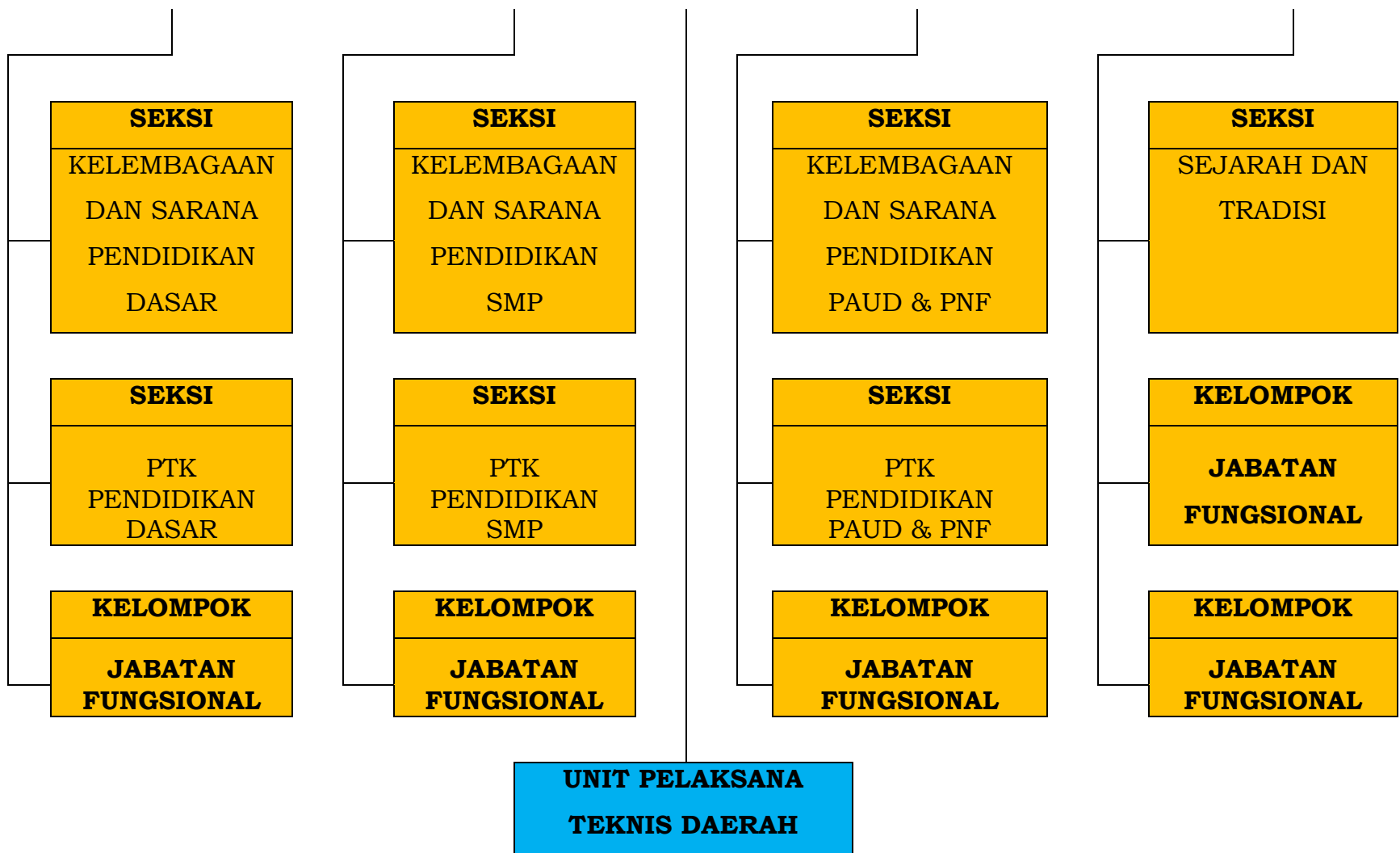
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 1 sub bagian dan 2 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar yang terdiri dari 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SD
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SD
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Kebudayaan yang terdiri dari 3 seksi yaitu :

- a. Seksi Cagar Budaya dan Museum
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi
 - c. Seksi Kesenian
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**





B. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis dinamika lingkungan eksternal terhadap proses Pelaksanaan pendidikan selama 5 (lima) tahun yang akan datang, yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang. Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang dilihat secara umum dan sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor-faktor dalam lingkungan internal dan eksternal .Beberapa isu strategis pendidikan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencara Strategi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- a. Masih rendahnya angka rata – rata lama sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan dibandingkan dengan target Provinsi Bengkulu dan target nasional.
- b. Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Masih kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas serta belum memenuhi Standar Kompetensi.
- d. Masih tingginya angka putus sekolah (APTS) sehingga akan mempengaruhi indicator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal bidang Pendidikan.
- e. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional

Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

Dari beberapa Isu-Isu tersebut akan menjadi Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan untuk periode tahun 2021-2026.

b. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan pendidikan mengandung arti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut akan sangat sejalan dengan program yang tengah digulirkan pemerintah pusat yaitu *education for all* (Pendidikan Untuk Semua) yang menghendaki tidak ada seorangpun warga Negara yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Kondisi saat ini, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah lulusan SD/Setingkat SD dan SMP/Setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Permasalahan lainnya dari pemerataan yaitu belum meratanya persebaran sekolah dengan sebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan di satu pihak ada sekolah yang kekurangan murid, sebaliknya ada pula sekolah yang justru tidak mampu menampung murid. Selain itu juga masih ada wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tergolong daerah tertinggal.

c. Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing

Isu ini muncul dipicu oleh rendahnya kualitas lulusan. Mutu lulusan sangat berkorelasi dengan rata-rata nilai UAN dan

penyerapan tenaga kerja pasca sekolah. Data menunjukkan, banyak siswa yang nilai UAN nya hanya tipis di atas standar nilai kelulusan dan tidak sedikit pula lulusan yang menganggur karena mereka tidak memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia usaha/industri.

d. Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan.

Isu ini muncul sehubungan masih rendahnya mutu lulusan yang salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya manajemen atau tata kelola pendidikan. Aspek manajemen akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan. Termasuk di dalam aspek ini yaitu manajemen penyelenggaraan persekolahan dan manajemen birokrasi pendidikan yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu lulusan pendidikan. Permasalahan yang selalu berulang dari tahun ke tahun adalah ketidaktersediaan data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel. Sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara provinsi, kabupaten/kota sampai ke sekolah-sekolah belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Lemahnya sistem pendataan pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi akuntabilitas dan pencitraan publik pelayanan pendidikan.

C. KEADAAN PEGAWAI

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2	Pembina Tingkat I	IV/B	48
3	Pembina	IV/A	17
4	Penata Tingkat I	III/D	27
5	Penata	III/C	24
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	16
7	Penata Muda	III/A	4
8	Pengatur Tingkat I	II/D	2
9	Pengatur	II/C	4
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	3
11	Pengatur Muda	II/A	1
12	Juru	I/C	1
JUMLAH			148

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	24 Orang
2.	Strata 1	99 Orang
3.	Diploma 2/Diploma 3	11 Orang
4.	SLTA	14 Orang
5.	SLTP	0 Orang
JUMLAH		148 Orang

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	0 Orang
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	2 Orang
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	IV/III	2 Orang

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Jenjang	<= SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1	TK	50	2	13	6	297	11	0	379
2	PAUD	385	2	29	15	184	1	0	616
3	SD	167	1	51	14	1.582	39	0	1.854
4	SMP	114	4	5	28	825	72	0	1.048

Sumber : Sub. Bagian Perencanaan (Dapodik)

D. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa sarana dan prasarana tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data sarana dan prasarana keadaan per 31 Desember 2023 bisa dilihat pada rincian tabel dibawah ini.

TABEL 2.3
ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	2	-	-
2	Gedung	14	Unit	-
3	Masjid	1	lokal	-
4	Mobil	1	Buah	Baik

5	Sepeda Motor	19	Buah	Baik
6	Scanner	1	Buah	Baik
7	Rak-Rak Penyimpanan	728	Buah	Baik
8	Brankas	1	Buah	Kurang Baik
9	Lemari Es	2	Buah	Baik
10	Papan Tulis	22	Buah	Baik
11	Papan Absen	19	Buah	Baik
12	Lemari	38	Buah	Baik
13	Meja	1713	Buah	Baik
14	Kursi	1108	Buah	Baik
15	Tempat Tidur	7	Buah	Baik
16	Daun Pintu Alumunium	15	Buah	Baik
17	Karpet	120	Buah	Baik
18	Jam Mekanis	2	Buah	Baik
19	AC	19	Buah	Baik
20	Kompur Gas	2	Buah	Baik
21	Televisi	4	Buah	Baik
22	Sound System	2	Buah	Baik
23	Camera	5	Buah	Baik
24	Dispenser	6	Buah	Baik
25	Bak Penampungan Air	1	Buah	Baik
26	PC Unit/ Komputer PC	16	Buah	Baik
27	Laptop	7	Buah	Baik
28	Notebook	12	Buah	Baik
29	Printer	15	Buah	Baik
30	Flashdisk	1	Buah	Baik
31	Monitor	1	Buah	Baik
32	Harddisk Eksternal	5	Buah	Baik
33	Router	1	Buah	Baik
34	Hub	1	Buah	Baik
35	Radio Access Point	1	Buah	Baik

36	Proyektor + Attachment	2	Buah	Baik
37	Microphone/Wireless Mic	2	Buah	Baik
38	Audio Master Control Unit	1	Buah	Baik
39	Amplifier	2	Buah	Baik
40	Peralatan studio Visual Lain-lain	2	Buah	Baik
41	Head Set	1	Buah	Baik
42	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
43	Moubiler Lainnya	1	Buah	Baik
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	Buah	Baik

Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan BMD (Aset)

TABEL 2.4
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	TK	63	229	216	13	0
2	PAUD	171	435	429	6	0
3	SD	120	1071	1043	28	0
4	SMP	34	408	408	17	0

E. KEUANGAN

Dari sisi penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan anggaran sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1.	2021	235.399.754.115	229.504.309.929	97,50
2.	2022	229.691.504.722	211.564.247.408	92,11
3.	2023	249.081.399.260	224.337.571.691	90,07

Sumber : Sub. Bagian Perencanaan (Laporan Triwulan)

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN DAN INOVASI DALAM REFORMASI SAKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Sistematika penulisan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Halaman Judul
- Ikhtisar Eksekutif
- Kata Pengantar
- Daftar isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.6 Latar Belakang
- 1.7 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
- 1.8 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja
- 1.9 Gambaran Umum Perangkat Daerah
 - A. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - B. Isu Strategis Perangkat Daerah
 - C. Keadaan Pegawai
 - D. Keadaan Sarana dan Prasarana
 - E. Keuangan
- 1.10 Sistematika Penulisan dan Inovasi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
 - A. Visi, Misi Kepala Daerah
 - B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - C. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah
 - A. Target Belanja
 - B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4 Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) adalah perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan program dan kegiatan daerah berdasarkan tolak ukur kinerja.

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan perencanaan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan di daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara efisien, efektif, profesional dan berkesinambungan serta telaksana secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Fungsi rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan pendidikan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan, mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu :

Tahap pertama : Persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi.

Tahap kedua : Penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra.

Tahap ketiga : Penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

jadi Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah.

D. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan telah dituangkan visi dan misi yang dibuat dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis. Dengan memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan untuk bersama membangun daerahnya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan). Adapun visi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) Berlandaskan Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing (Cinta BS)	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sejahtera dan berdaya saing.	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) Berlandaskan Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing (Cinta BS)	Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan, lingkungan dan berkelanjutan.	1. Meningkatnya akses dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis 2. Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar secara

		berkelanjutan 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 4. Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana
	Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas berdaya saing.	1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah 2. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah 3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.	1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Sumber : RPJMD 2021-2026

E. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun

ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Selatan

VISI		Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) Berlandaskan Cerdas, Integritas, Inovatif, Agamis dan Berdaya Saing (CINTA BS)		
MISI		Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sejahtera dan berdaya saing		
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan Pelestarian Budaya	1. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	1. Meningkatkan APS PAUD 2. Meningkatkan APS SD 3. Meningkatkan APS SMP	1. Meningkatkan mutu PAUD, SD dan SMP dengan menyediakan sarana prasarana yang berkualitas.
		2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	1. Meningkatkan Persentase Lulusan SD 2. Meningkatkan Persentase Lulusan SMP 3. Meningkatkan Angka Rata-rata Nilai Asesmen SD 4. Meningkatkan Angka Rata-rata Nilai Asesmen SMP	2. Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan SD dan SMP

		1. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik
		1. Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	1. Tercapainya Pelestarian Budaya Daerah
			Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	

Dari ke 4 misi tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan misi 1 dengan tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

MISI 1 : a. Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sejahtera dan berdaya saing

- b. Sasaran : - Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan

MISI 2 : a. Tujuan : Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

- b. Sasaran : Melakukan pembangunan, rehabilitasi serta pengadaan sarana prasarana gedung sekolah.

MISI 4 : a. Tujuan : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan professional birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good govermance dan electronic govermance.

- b. Sasaran : 1.Meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan.
2.Meningkatkan kualitas dan kompetensi kelulusan.
3. Meningkatkan kerjasama kemitraan dunia usaha dan dunia industri.

F. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Tabel 2.2

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan APS PAUD 2. Meningkatkan APS SD 3. Meningkatkan APS SMP	1. Meningkatkan mutu PAUD, SD dan SMP dengan menyediakan sarana prasarana yang berkualitas.
1. Meningkatkan Persentase Lulusan SD 2. Meningkatkan Persentase Lulusan SMP 3. Meningkatkan Angka Rata-rata Nilai Asesmen SD 4. Meningkatkan Angka Rata-rata Nilai Asesmen SMP	2. Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan SD dan SMP
1. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Menigkatnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik

1. Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	1. Tercapainya Pelestarian Budaya Daerah
--	--

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan Visi, Misi tujuan strategis pembangunan pendidikan serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, maka strategi yang akan dicapai adalah:

1. Penyediaan dan pengembangan sistem Pembelajaran, data dan informasi dan standar mutu pendidikan dasar dan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan.
2. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana peningkatan mutu dan berkualitas yang merata di seluruh jenjang pendidikan sehingga terpenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3. Pemerataan guru dan perluasan akses pendidikan
4. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan guru dan memberikan insentif pada guru yang bertugas di daerah pelosok/terpencil.

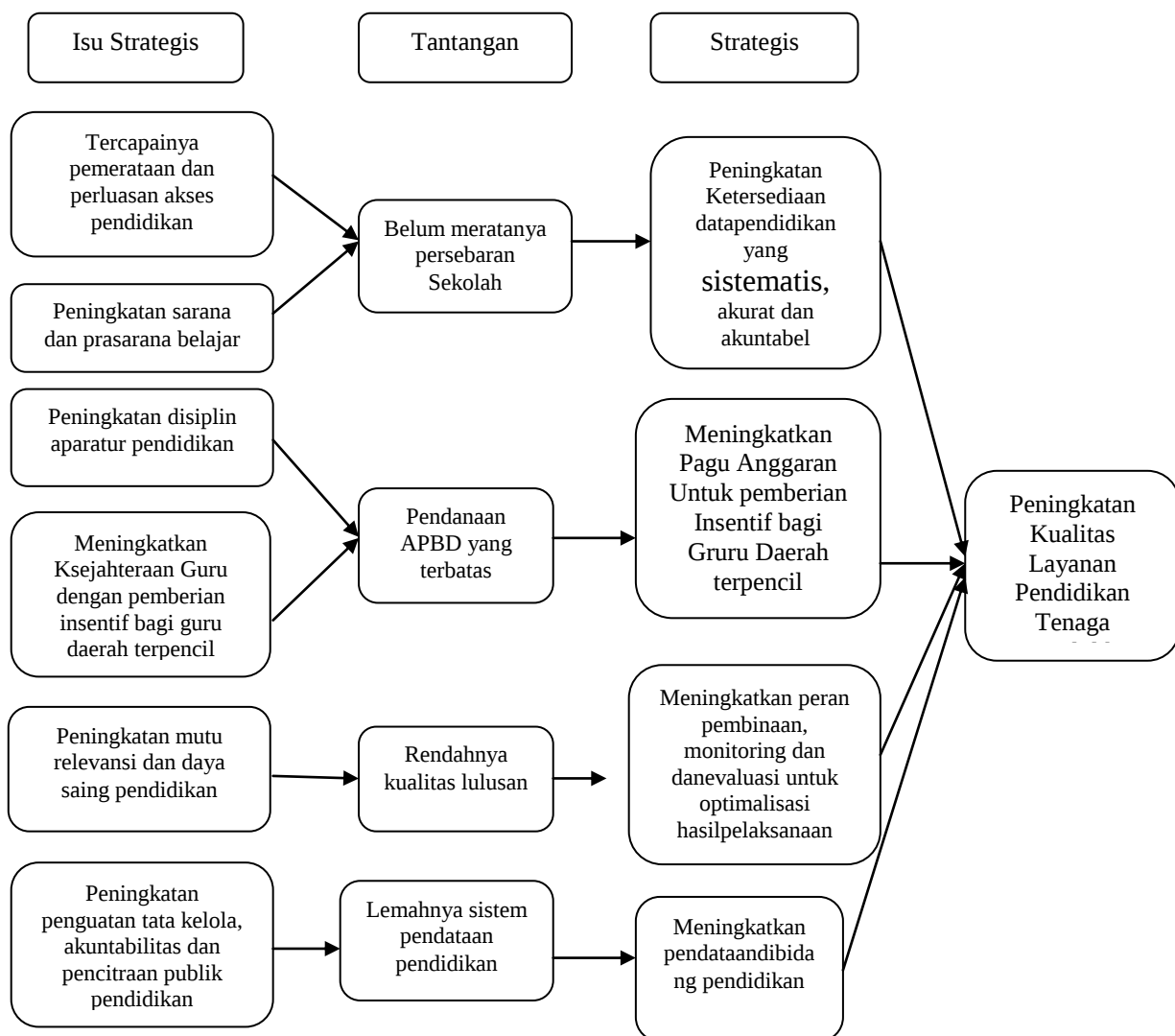
Program untuk pencapaian sasaran tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

NO	SASARAN	DIDUKUNG JUMLAH PROGRAM
1	Meningkatnya Kondisi Bangunan Sekolah	1 Program
2	Meubeler berupa kursi dan meja murid yang tidak layak pakai	1 Program
3	Penataan Lingkungan Sekolah yang belum tertata dengan baik	1 Program

4	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal	2 Program
5	Meningkatkan layanan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan	2 Program
6	Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM pendidik.	1 Program
7	Meningkatkan peran kebudayaan dalam membentuk karakter pelajar	2 Program

Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan dengan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.4

1	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	APK SD Meningkatkan
		APK SMP Meningkatkan
		APS PAUD Meningkatkan
		APS SD Meningkatkan
		APS SMP Meningkatkan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja, IKU dan Anggaran OPD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Bupati Bengkulu Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akses terhadap layanan pendidikan	- Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	100
		- Angka Partisipasi Sekolah SD	%	100
		- Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	100

2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	- Persentase Kelulusan SD	%	100
		- Persentase Kelulusan SMP	%	100
		- Rata-rata nilai Asesmen Nasional SD		
		- Nilai Literasi - Nilai Numerasi	Nilai	53,82 38
		- Rata-rata nilai Asesmen Nasional SMP		
		- Nilai Literasi - Nilai Numerasi	Nilai	60 56
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	%	100
4	Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	- Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	%	2
		- Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	%	56

Sumber : Subag. Perencanaan (Dokumen Perjanjian Kinerja)

2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah

A. Target Belanja

Dari kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 254.928.179.269,- Yang digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara rinci rencana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

NO	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	202.987.876.380,-	79,6
2	Belanja Langsung	51.940.296.880,-	20,4
	Jumlah	254.928.173.260,-	100

B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi Anggaran per program untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Bengkulu Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

Alokasi Anggaran Per Program

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	205.657.772.810,-
2	Program Pengelolaan Pendidikan	49.081.709.450,-
3	Program Pengembangan Kurikulum	95.000.000,-
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	91.691.000,-
5	Program Pengembangan Kebudayaan	358.650.000,-
6	Program Kesenian Tradisional	50.000.000,-
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	20.000.000,-
	Jumlah	254.928.179.269,-

Sedangkan Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	- Persentase APM PAUD	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan	Persentase Pendidikan Terkelola	47.455.751.570
		- Persentase APM SD			
		- Persentase APM SMP			
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	- Persentase Kelulusan SD			1.377.791.380
		- Persentase Kelulusan SMP			
		- Persentase Pendidikan Dasar Berakreditasi A			
		- Rata-rata Nilai Ujian Nasional (SD)			
		- Rata-rata Nilai Ujian Nasional (SMP)			
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti diklat pengembangan kompetensi	248.166.500

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	ANGGARAN
4	Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	- Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional - Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya Tata Kelola Cagar Budaya	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	428.650.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) merupakan media atau wadah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi yang melaporkannya. Laporan kinerja juga merupakan jendela bagi pihak luar untuk mengetahui kinerja di dalam organisasi, disusun sesuai dengan tingkat tanggung jawab instansi yang bersangkutan. Lakip memuat penjelasan tentang capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah tersebut di masa mendatang.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak pemangku kepentingan tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sbb :

Tabel 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2023 Terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase APS PAUD	89,04	88	95,42	108,43	95	100,44
2.	Persentase APS SD	94,66	94	96,06	102,19	98	98,02
3.	Persentase APS SMP	84,88	86	94,59	109,99	90	105,1
4.	Persentase Kelulusan SD	100	100	100	100	100	100
5.	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional SD						
	- Nilai Literasi	1,57	53,82	53,99	100,32	56	92,36
	- Nilai Numerasi	1,47	38	41,55	109,34	42	86,47
6.	Persentase Kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100
7.	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional SMP						

	- Nilai Literasi	1,7	60	57,75	96,25	65	100
	- Nilai Numerasi	1,63	56	36,72	65,57	60	95,89
8.	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik	75,70	75	79,40	105,86	100	79,40
9.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	-	2	0	0	2	0
10	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	52	56	52	92,85	56	92,85

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pengemban amanah di bidang pengelolaan pendidikan melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun

2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Bengkulu Selatan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja pertama memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kedua sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja disusun setahun sekali dan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagai perwujudan dan kewajiban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut ini akan diuraikan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun Anggaran 2023 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Terhadap Layanan Pendidikan

Sasaran meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan dilaksanakan dengan 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pengelolaan Pendidikan Dasar dan 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama serta dengan 6 (enam)

sub Kegiatan meliputi Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar PAUD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD dan kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP. Capaian kinerja pada sasaran ini rata-rata dapat terlaksana 100 %.

Gambaran realisasi dari sasaran meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Uraian		Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Sekolah	2	2	100
2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Murid/ Sekolah	205	205	100
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	40	40	100
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Lembaga	200	200	100
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Sekolah	12	12	100
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas SMP	Sekolah	3	3	100

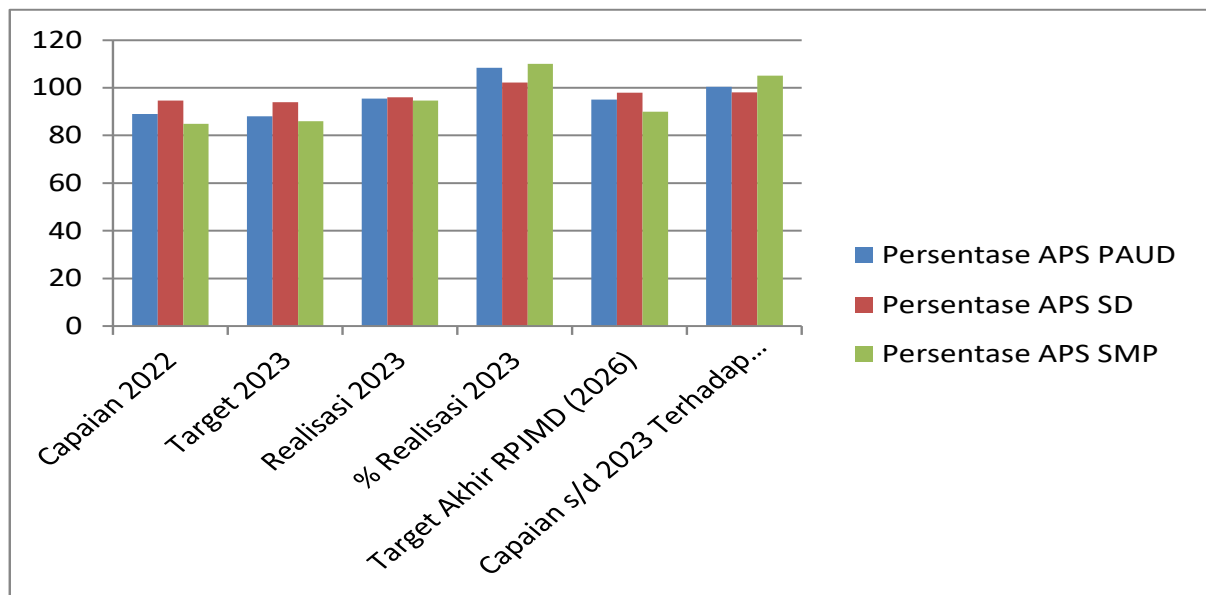
Tabel 3.3
PENCAPAIAN IKU INDIKATOR KINERJA
SASARAN MENINGKATNYA AKSES LAYANAN PENDIDIKAN

No	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2023 Terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase APS PAUD	89,04	88	95,42	108,43	95	100,44
2.	Persentase APS SD	94,66	94	96,06	102,19	98	98,02
3.	Persentase APS SMP	84,88	86	94,59	109,99	90	105,1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gambaran Capaian Indikator sasaran dari meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan dapat dilihat pada Grafik berikut ini

Grafik 1
Grafik Pencapaian IKU Pada Indikator Kinerja
Sasaran Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan





Pencapaian IKU untuk Meningkatnya Akses Terhadap Layanan Pendidikan antara target yang ditetapkan pada indikator sasaran dan realisasi pencapaiannya adalah : Untuk persentase APS PAUD mencapai 95,42%, Persentase APS SD mencapai 96,06 % dan Persentase APS SMP 94,59 % dari target masing - masing yang ditetapkan sehingga persentase realisasi keseluruhan mencapai diatas 95,35 % dengan demikian capaian IKU pada sasaran ini di kategorikan Sangat Tinggi.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Sasaran meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu Pengelolaan Pendidikan dan 2 (Dua) Kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama serta 7 (tujuh) sub kegiatan dan yang meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SD, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan

Pendidikan SD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMP, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP, dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP. Capaian kinerja pada sasaran 2 ini rata-rata dapat terlaksana 100 %,

Gambaran realisasi sasaran strategis dan Capaian Indikator sasaran dari meningkatnya layanan Pendidikan SD dan SMP dapat digambarkan pada Tabel berikut ini

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya
Kualitas Layanan Pendidikan

Uraian		Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SD	Sekolah	130	130	100
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	Sekolah	130	130	100
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD	Sekolah	40	40	100
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD	Sekolah	130	130	100
5	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMP	Sekolah	36	36	100
6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Sekolah	36	36	100
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP	Sekolah	33	33	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3.5
PENCAPAIAN IKU INDIKATOR KINERJA SASARAN MENINGKATNYA
KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

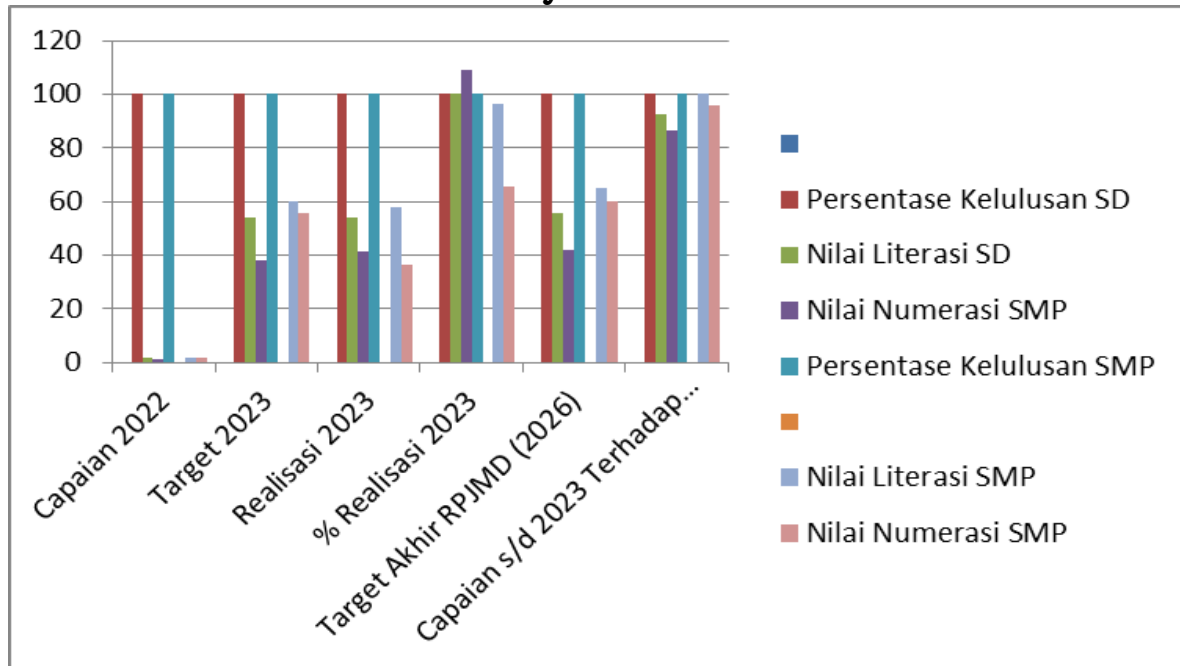
No	INDIKATOR	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2023 Terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Kelulusan SD	100	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional SD						
	- Nilai Literasi	1,57	53,82	53,99	100,32	56	92,36
	- Nilai Numerasi	1,47	38	41,55	109,34	42	86,47
	-						
3.	Persentase Kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100
4.	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional SMP						
	- Nilai Literasi	1,7	60	57,75	96,25	65	100
	- Nilai Numerasi	1,63	56	36,72	65,57	60	95,89

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gambaran Capaian Indikator sasaran dari Meningkatnya Akses Terhadap Layanan Pendidikan dapat digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 2

Grafik Pencapaian IKU sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan



Gambar 2
Salah satu Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2022/2023

Pencapaian IKU untuk sasaran ini, antara target yang ditetapkan per indikator sasaran dan realisasi pencapaiannya adalah : untuk persentase Kelulusan SD dan SMP tercapai 100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 100 %, sedangkan untuk Rata-rata Asesmen SD untuk

nilai literasi pencapaiannya adalah 53,99 atau 100,32 % sedangkan nilai numerasi pencapaiannya adalah 41,55 atau 109,34 dari target yang telah ditentukan yaitu target literasi 53,82 dan target numerasi 38 sedangkan untuk rata-rata nilai asesmen SMP telah tercapai untuk nilai literasi adalah 57,75 atau 96,25 % dan nilai numerasi adalah 36,72 atau 65,57 % dari target literasi yaitu 60 dan target numerasi 56. Ini berarti untuk tingkat SD telah melebihi dari yang ditentukan sedangkan tingkat SMP belum tercapai. Dengan Nilai rata-rata nasional SD dan SMP yang telah dicapai tahun 2023 ini, maka nilai untuk Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk kategori sangat baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ada 2 (dua) Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini, meliputi Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Capaian kinerja pada sasaran 3 ini seluruhnya dapat terlaksana 100 %.

Realisasi Capaian Kinerja dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini dapat kita lihat pada tabel berikut : Sedangkan realisasi sasaran strategis dan Capaian Indikator sasaran dari meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.6
REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA
KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Uraian		Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	100	100	100
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kegiatan	100	100	100

Sedangkan realisasi pencapaian IKU indikator kinerja sasaran strategis dan Capaian Indikator sasaran dari meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini

Tabel 3.7
PENCAPAIAN IKU INDIKATOR KINERJA SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

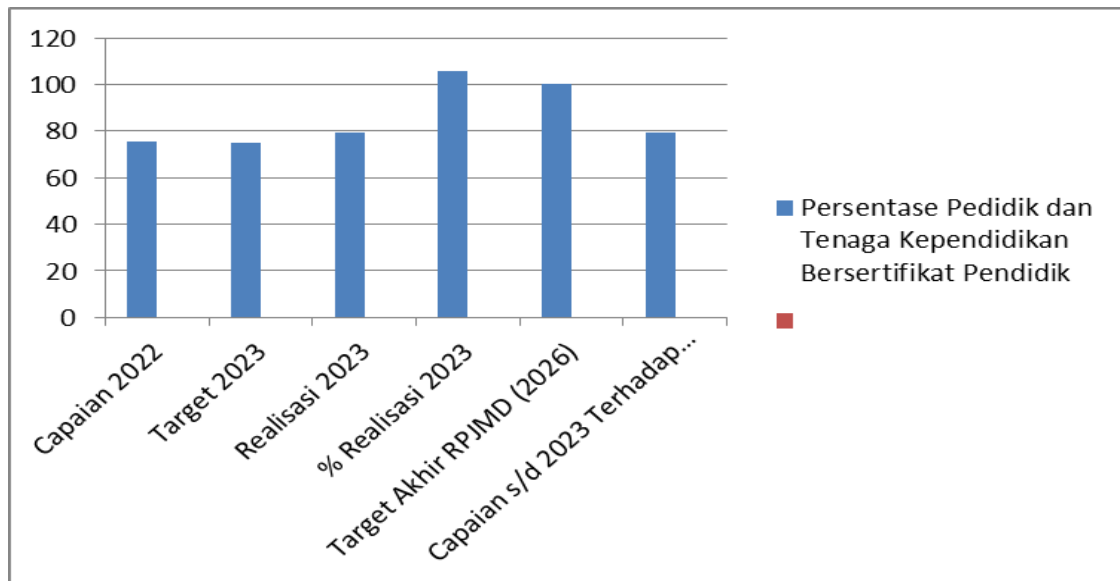
No	INDIKATOR	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2023 Terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik	75,70	75	79,40	105,86	100	79,40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gambaran Pencapaian IKU pada sasaran meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat digambarkan pada grafik berikut

Grafik 3

GRAFIK PENCAPAIAN IKU SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Gambar 3
Kegiatan Diklat Pengembangan Karir PTK Tahun 2023

Pencapaian IKU untuk sasaran meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan antara target yang ditetapkan antara indikator sasaran dan realisasi pencapaiannya mencapai angka 79,4 %

dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75 % dengan persentase realisasi sebesar 105,86 %, ini artinya capaian IKU pada sasaran 3 ini dikategorikan Sangat tinggi

Sasaran 4 : Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah

Sasaran Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan 2 (dua) Program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, 3 (tiga) Kegiatan meliputi Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten/Kota, Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota serta 3 (tiga) Sub Kegiatan yang meliputi Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat dan Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya. Capaian kinerja pada sasaran ini dapat terlaksana hampir 100 %, Gambaran realisasi sasaran strategis dan Capaian Indikator sasaran dari Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut ini

Tabel 3.8
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah

Uraian		Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5
1	Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau	Kegiatan	1	1	100

	berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan				
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dokumen	1	1	100
3	Pelindungan Cagar Budaya	Kegiatan	2	2	100

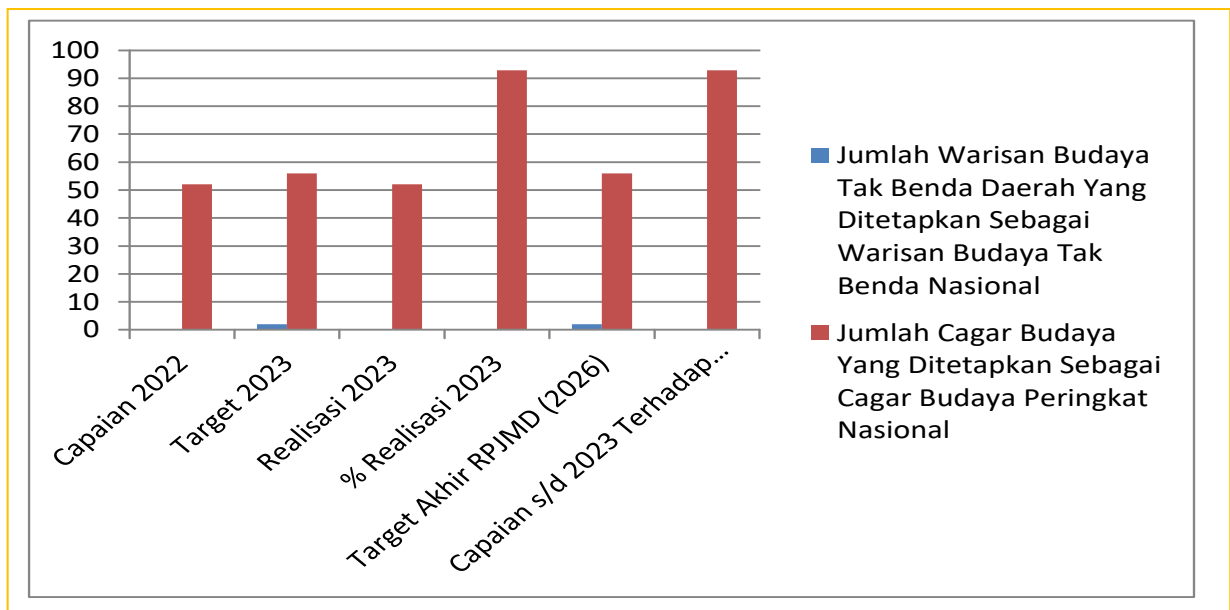
Tabel 3.9
Pencapaian IKU Sasaran Meningkatnya
Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah

No	INDIKATOR	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2023 Terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	-	2	0	0	2	0
2.	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	52	56	52	92,85	56	92,85

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gambaran Pencapaian IKU pada sasaran Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dapat digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 4
Grafik Pencapaian IKU Indikator Kinerja sasaran 4



Gambar 6 Kegiatan Rapat dalam rangka pengumpulan bahan untuk pengusulan warisan budaya tak benda Tahun 2023

Pencapaian IKU untuk sasaran Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah antara target yang ditetapkan per indikator sasaran dan realisasi pencapaiannya adalah : untuk Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah Yang

Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional dari target yang ditetapkan sebanyak 5 Objek yang meliputi Seni dendang, tari Andun, Berzanji, Tari Rawas dan Ke aik nari, dimana sampai akhir tahun anggaran 2023 masih dalam proses penginputan dan penetapan dari operator warisan budaya tak benda pusat, jadi belum dapat terealisasi sama sekali atau 0 %. sedangkan Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat terealisasi 52 atau sebesar 92,85 % dari target yaitu 56, capaian IKU pada sasaran ini di satu item kategorikan sangat rendah dan di satu item sangat tinggi.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dapat disimpulkan hampir seluruh program, kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan perencanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diwujudkan dengan baik yaitu mencapai realisasi kegiatan sebesar 97,50% dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Namun demikian masih banyak terdapat kendala dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Belum memadainya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan valid.
3. Belum terlaksananya pemerataan guru pendidik pada daerah pelosok pedesaan.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pendidikan.
5. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional Standar Pelayanan Minimal pendidikan.
6. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Strategi pemecahan masalah :

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan rekrutmen untuk menambah kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Menyediakan anggaran untuk menunjang sarana prasarana penyediaan data
3. Melakukan rotasi dan mutasi guru sesuai dengan zona tempat tinggal.
4. Memberikan pelatihan teknis kepada SDM di OPD dan Satuan Pendidikan guna meningkatkan kualitas di bidang teknologi informasi.
5. Berusaha semaksimal mungkin untuk terlaksananya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
6. Membuat usulan agar anggaran pemerintah di tambah untuk mengurangi kesenjangan antara anggaran dengan rencana kegiatan

3.3 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bengkulu Selatan melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 248.143.981.260.-. Perincian Rencana Belanja sebelum dan setelah perubahan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini :

TABEL 3.10

CAPAIAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	% REALISASI
1	2	3				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.544.772.810	205.544.772.810	182.315.141.900	23.229.630.910	88,69
	Perencanaan, Pengangguran, dan I Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.384.600	248.384.600	243.126.779	5.257.821	97,88
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	91.987.492	8.012.508	91,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.493.600	95.493.600	93.164.779	2.328.821	97,56
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.891.000	152.891.000	149.962.000	2.929.000	98,08
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	204.397.646.980	204.397.646.980	180.886.138.985	23.511.507.995	88,50
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	202.987.876.380	202.987.876.380	187.086.858.246	15.901.018.134	92,17
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.520.600	61.520.600	60.619.800	900.800	98,54

	Pelaksanaan Penatausahaan dan 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.348.250.000	1.348.250.000	1.312.940.000	35.310.000	97,38
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.976.200	697.976.200	663.761.815	34.214.385	95,09
	Penyediaan Komponen Instansi 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.990.000	10.990.000	10.959.500	30.500	99,72
	2 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	9.066.000	9.066.000	8.400.000	666.000	92,65
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.622.000	115.622.000	114.249.100	1.372.900	98,81
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.655.000	38.655.000	32.905.000	5.750.000	85,12
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	125.595.000	125.595.000	124.290.000	1.305.000	98,96
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.048.000	398.048.000	372.948.215	25.099.787	93,69
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.252.230	124.252.230	122.588.222	1.664.008	98,66
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.520.030	95.520.030	94.890.822	629.208	99,34
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.732.200	28.732.200	27.697.400	1.034.800	96,40
	Pemeliharaan Barang Milik V Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.513.000	91.513.000	76.513.000	15.000.000	83,60

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.513.000	69.513.000	69.513.000	-	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	42.122.867.450	42.122.867.450	41.824.503.708	298.363.742	95,46
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.896.921.150	22.896.921.150	22.803.856.386	93.064.764	94,92
1	Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekola	60.000.000	60.000.000	58.582.242	1.417.758	97,63
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	8.038.500.000	8.038.500.000	8.038.500.000	-	100
3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	201.836.300	201.836.300	191.694.300	10.142.000	94,97
II	4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000	150.000.000	126.213.950	23.786.060	84,14
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	35.000.000	35.000.000	16.086.000	18.914.000	45,96
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	193.543.250	193.543.250	174.670.840	18.872.410	90,29
7	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	14.218.041.570	14.218.041.570	14.198.109.054	14.019.932.516	99,86

II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.224.907.200	13.224.907.200	13.132.858.915	22.048.285	99,30
1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.385.386.000	3.385.386.000	3.380.196.500	5.189.500	99,85
2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	165.000.000	165.000.000	137.624.890	27.375.110	83,41
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000	150.000.000	126.190.000	23.810.000	84,13
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	50.000.000	47.072.840	2.927.160	94,14
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	155.821.200	155.821.200	142.757.650	13.063.550	91,62
6	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Pertama	9.318.700.000	9.318.700.000	9.299.016.385	19.683.615	99,79
III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.210.891.900	4.210.891.900	4.158.167.413	52.724.487	98,74
1	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	118.343.400	118.343.400	112.693.771	5.649.629	95,22
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	163.166.500	163.166.500	144.626.775	18.539.725	88,63
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000	100.000.000	71.464.867	28.535.133	71,46
4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.829.382.000	3.829.382.000	3.829.382.000	-	100
IV	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.790.147.200	1.790.147.200	1.729.620.994	60.526.205	96,62

	1 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	93.247.000	93.247.000	82.822.471	10.424.529	88,82
	2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	25.451.523	24.548.477	50,90
	3 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.646.900.000	1.646.900.000	1.621.347.000	25.553.000	98,45
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	95.000.000	95.000.000	67.266.750	27.733.250	70,80
	I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	95.000.000	95.000.000	67.266.750	27.733.250	70,80
	1 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	95.000.000	95.000.000	67.266.750	27.733.250	70,80
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	91.691.000	91.691.000	91.132.100	558.900	99,39
	I Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik	91.691.000	91.691.000	91.132.100	558.900	99,39
III	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
	1 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	54.000.000	54.000.000	53.621.400	478.600	99,30
	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	37.691.000	37.691.000	37.510.700	180.300	99,52

	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	426.650.000	426.650.000	339.042.283	87.607.717	79,46
	Pengelolaan Kebudayaan yang I Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	64.380.000	85.620.000	42,92
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150.000.000	150.000.000	64.380.000	85.620.000	42,92
	Pembinaan Lembaga Adat yang II Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	208.650.000	208.650.000	206.261.283	2.388.717	98,85
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	208.650.000	208.650.000	206.261.283	2.388.717	98,85
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	20.000.000	20.000.000	19.802.500	197.500	99,01
	I Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	19.802.500	197.500	99,01
V 1	Perlindungan Cagar Budaya	20.000.000	20.000.000	19.802.500	197.500	99,01
TOTAL		248.397.981.260	248.397.981.260	231.772.483.309	16.625.4971.951	93,40

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dilakukan langkah konkrit dan nyata dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dinas Pendidikan melakukan beberapa inovasi antara lain :

Tabel 3.4.1 Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Inovasi	Legalitas	Manfaat	Ket
1	Bengkulu Selatan Kota Hafidz	Peraturan Bupati	Membina Generasi Muda yang mampu menghafal kitab Suci Al Quran	

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ini merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama satu tahun anggaran serta merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Instansi Pemerintah.

Kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan hasil pengukuran kinerja yang meliputi kegiatan yang mendukung sasaran strategis. Secara umum, capaian kinerja Tahun 2023 yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan semua program kegiatan yang mendukung yang terdapat dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan walau secara keuangan terealisasi hanya 93,40 % namun secara fisik dapat terealisasi 100%.

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Terdapat sebanyak 4 indikator kinerja capaiannya melebihi target 100 % yaitu :
 - a. Persentase APS PAUD yaitu 108,43 %
 - b. Persentase APS SD Yaitu 102,19 %
 - c. Persentase APS SMP yaitu 109,99
 - d. Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional SD
 - Nilai Literasi 53,99
 - Nilai Numerasi 41,55

- e. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersertifikat pendidik 79,40 atau 105,86%
2. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target 100 % yaitu :
 - a. Persentase Kelulusan SD
 - b. Persentase Kelulusan SMP
3. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mencapai target dengan kategori tinggi dan sangat tinggi yaitu :
 - a. Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional SMP yaitu
 - Nilai Literasi 57,75
 - Nilai Numerasi 36,72
 - b. Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional yaitu 52
4. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu :
 - a. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional yaitu 0 %

Dengan adanya Laporan akuntabilitas kinerja ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencoba mempertanggung jawabkan segala upaya yang dilaksanakan dalam mencapai Visi dan Misi. Di samping itu laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemicu bagi perbaikan kinerja OPD di masa-masa yang akan datang dalam rangka pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkandalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

4.2 REKOMENDASI

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menyempurnakan laporan kinerja ini, sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara dengan

cara melakukan perbaikan cascading, sasaran kinerja, indikator kinerja, strategi kebijakan, program, penganggaran dan strategi penggunaan sumberdaya aparatur.

2. Keterbukaan dalam memberikan data untuk Penyusunan Laporan Kinerja serta pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.

